



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASHURI
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA HUKUM
3. NHK : 722928

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** 795.000.000

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA TULANG BAWANG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 3.159 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 1.870 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 1.208 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 2.349 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 1.874 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 625 m2 di KAB / KOTA TULANG BAWANG BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** 208.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 150 X1H02N35M1 A/T / SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS 1.5 R M/T (F800RG-GMMFJ) Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	27.377.449
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.030.377.449
III. HUTANG	Rp.	143.379.600
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	886.997.849

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.